

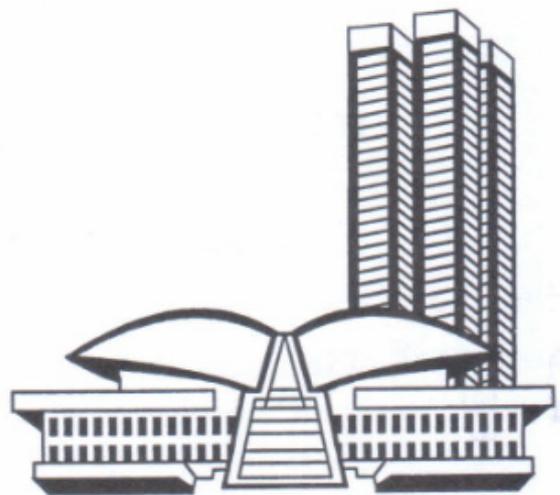
Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 2, Juni 2017

ISSN 0853-9316

- PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
oleh: Venti Eka Satya
- ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM
oleh: Iwan Hermawan
- KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA
oleh: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
- MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
oleh: Joko Riskiono
- EDUCATION SYSTEM REFORM IN INDONESIA: PROGRESS AND CHALLENGES
oleh: Harris Y. P. Sibuea
- PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA
oleh: Handrini Ardiyanti



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 2, Juni 2017

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i
● PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>oleh: Venti Eka Satya</i>	85-97
● ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM <i>oleh: Iwan Hermawan</i>	99-115
● KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA <i>oleh: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i>	117-127
● MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL <i>oleh: Joko Riskiono</i>	129-147
● EDUCATION SYSTEM REFORM IN INDONESIA: PROGRESS AND CHALLENGES <i>oleh: Harris Y. P. Sibuea</i>	149-160
● PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAHAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA <i>oleh: Handrini Ardiyanti</i>	161-177

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi Juni 2017. Berbagai isu yang disajikan dalam Edisi Juni ini sangat beragam, baik bidang hukum, kebudayaan maupun ekonomi. Terdapat enam tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Penerapan Dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Yogyakarta”, yang ditulis oleh Venti Eka Satya. Artikel ini mengulas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Daerah DIY pada tahun 2015 memperoleh nilai tertinggi (80,68) dengan predikat A. Aparat pengawasan intern pemerintah DIY juga berada pada level maturitas 3. Pemda DIY telah berhasil menerapkan SPIP di lingkungan organisasinya. Namun kendala yang masih dihadapi adalah rendahnya kompetensi SDM dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi SDM; kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SPIP dan belum tumbuhnya budaya SPIP dalam organisasi; banyak pimpinan organisasi pada OPD yang belum memahami filosofi pengendalian intern dan rendahnya komitmen mereka terhadap pelaksanaan SPIP.

Artikel kedua adalah tentang “Analisis Daya Saing Komoditas Pertanian Dan Bahan Pangan Indonesia Di Pasar Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam”, yang ditulis oleh Iwan Hermawan dari Pusat Penelitian. Perubahan positif dari ekonomi negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor nonmigasnya. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor komoditas pangan dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV tumbuh lebih tinggi selama periode tahun 2001-2016 jika dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Hasil perhitungan dengan menggunakan indeks RTA memberikan gambaran sebagian besar dari komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia memiliki keunggulan perdagangan. Potensi pasar CLMV yang besar harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan, termasuk menentukan komoditas pertanian dan bahan pangan yang menjadi prioritasnya.

Tulisan ketiga membahas isu UKM dengan judul “Kebijakan Penyaluran Modal Melalui Koperasi Berbasis Komunitas Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta”, yang ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi. Perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan tren positif, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Kajian ini memberikan alternatif kebijakan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui koperasi berbasis komunitas UKM dengan terlebih dahulu melakukan penyederhaan dan pengurangan jumlah koperasi.

Tulisan keempat ditulis oleh saudara Joko Riskiono dengan judul “Mengevaluasi Dan Menginventarisasi Pelaksanaan Program Legislasi Nasional”. Setiap kali ditetapkan Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan selalu menuai perhatian dan kritik publik. Hal itu didasari oleh capaian Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan baik secara kualitas maupun kuantitas rendah. Ketidakberhasilan tersebut, harus dilakukan evaluasi dan inventarisasi oleh Badan Legislasi selaku yang bertanggungjawab mengkoordinasi penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang. Namun hingga saat ini, terhadap hasil evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi dinilai sebagai rutinitas tahunan belum mampu mengembalikan kepercayaan publik.

Tulisan tentang “*Education System Reform In Indonesia: Progress And Challenges*” yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea dari Pusat Penelitian merupakan satu-satunya artikel yang berbahasa Inggris dalam edisi ini. Saat ini UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Temuan yang didapat dari kajian ini bahwa Pemerintah diharapkan dapat membuat dasar hukum untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Meskipun program wajib belajar 9 tahun hampir mendekati target, pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih untuk akses pendidikan di daerah terpencil sehingga target dapat dipenuhi 100%. Dalam hal perubahan kurikulum perlu dipikirkan formulasi jangka waktu perubahan antara 5 atau 10 atau 15 tahun. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada guru dengan membuat kebijakan yang membuat guru setia dan fokus akan profesinya.

Tulisan yang terakhir berjudul “Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya”, yang ditulis oleh Handrini Ardiyanti. Kebijakan perfilman yang diterapkan

negara mempengaruhi perkembangan industri perfilman di negara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perfilman mempengaruhi perkembangan industri perfilman dapat diketahui antara lain dengan cara melakukan studi sejarah. Dari hasil telaah diketahui sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan perfilman Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi tahapan produksi dengan memberikan dukungan maksimal bagi tumbuh berkembangnya sekolah film, membantu permodalan dengan *sistem fund to funds*, memperbaiki kebijakan sensor yang mempertimbangkan proses produksi film, mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya konsep bioskop komunitas, mendukung promosi film Indonesia dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan lainnya dibawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif, dan menumbuhkembangkan kebanggaan pada film Indonesia melalui strategi ekspansi budaya.

Demikianlah keenam karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Juni 2017. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Munajat, PhD; Prof. Dr. Dwi Purwoko; Dr. Y. B. Suhartoko, S.E., M.E; Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S.; Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si; dan Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Juni 2017

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Venti Eka Satya (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 85-97

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Laporan keuangan Daerah DI Yogyakarta (DIY) telah lima kali berturut-turut (2011-2015) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Daerah DIY pada tahun 2015 memperoleh nilai tertinggi (80,68) dengan predikat A. Aparat pengawasan intern pemerintah DIY juga berada pada level maturitas 3. Indonesia. Dalam penelitian ini dianalisis penerapan SPIP pada pemerintahan DIY serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemda DIY sudah merintis pelaksanaan sistem pengendalian intern sejak 2005. Pengendalian internal pemerintah daerah sudah menjadi komitmen Gubernur DIY sejak mencanangkan Reformasi Total pada 1998/1999. Pemerintah DIY sangat memahami pentingnya SPIP. Pemerintah DIY menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa aturan turunan yang relevan. Pemda DIY telah berhasil menerapkan SPIP di lingkungan organisasinya hal ini terlihat dari nilai LAKIP, opini atas Laporan Keuangan serta jawaban kuesioner dari pemerliti. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP adalah rendahnya kompetensi SDM dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi SDM; kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SPIP dan belum tumbuhnya budaya SPIP dalam organisasi; banyak pimpinan organisasi pada OPD yang belum memahami filosofi pengendalian intern dan rendahnya komitmen mereka terhadap pelaksanaan SPIP.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Audit Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, Lingkungan Pengendalian, *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO*.

**ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN DAN BAHAN PANGAN INDONESIA
DI PASAR KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM**

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 99-115

Perubahan positif dari ekonomi negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor nonmigasnya. Namun perkembangan produksi komoditas pertanian dan bahan pangan justru masih dihadapkan pada isu skala ekonomi usaha terbatas, penurunan bantuan pemerintah hingga risiko perubahan iklim. Resultan kondisi ini akan memengaruhi daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV melalui aktivitas perdagangan. Pendekatan penelitian menggunakan indeks *Relative Trade Advantage* (RTA). Sedangkan data sekunder bersumber dari *Comtrade*, *World Integrated Trade Solution*, *International Monetary Fund*, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pertanian. Periode analisis data mencakup rentang tahun 2001-2016 dengan pertimbangan tertentu. Subjek komoditas perdagangan yang dianalisis menggunakan *Harmonized Sections* (HS) tahun 2012 dua digit, yaitu HS 01-24 sebagai kelompok komoditas pertanian dan bahan pangan. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor komoditas pangan dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV tumbuh lebih tinggi selama periode tahun 2001-2016 jika dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Lebih lanjut dari hasil perhitungan dengan menggunakan indeks RTA memberikan gambaran di mana sebagian besar dari komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV memiliki keunggulan perdagangan dan sebagian lainnya tidak memiliki keunggulan tersebut. Potensi pasar CLMV yang besar harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan, termasuk menentukan komoditas pertanian dan bahan pangan yang menjadi prioritasnya.

Kata kunci: komoditas pertanian, bahan pangan, CLMV, daya saing, indeks RTA.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

KEBIJAKAN PENYALURAN MODAL MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 117-127

Koperasi dan UKM merupakan pilar perekonomian nasional yang berperan besar dalam memajukan ekonomi rakyat. UKM sendiri telah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi dengan tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun permasalahan modal masih menjadi masalah utama bagi UKM dalam rangka mengembangkan usaha. Kajian ini akan membahas permasalahan modal serta solusi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM yang ada di Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian bantuan modal. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis naratif terhadap data yang diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan di Kota Surakarta pada bulan Agustus 2016. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan tren positif, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Kajian ini memberikan alternatif kebijakan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui koperasi berbasis komunitas UKM dengan terlebih dahulu melakukan penyederhaan dan pengurangan jumlah koperasi.

Kata kunci: Koperasi, UKM, Komunitas, Modal.

MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 129-147

Setiap kali ditetapkan Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan selalu menuai perhatian dan kritik publik utamanya terhadap hasil capaian legislasi yang tidak memuaskan hal itu didasari oleh capaian Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan baik secara kualitas menurun bahkan secara kuantitas rendah. Ketidakberhasilan tersebut, harus dilakukan evaluasi dan inventarisasi oleh Badan Legislasi selaku yang bertanggungjawab mengkoordinasi penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Namun hingga saat ini, terhadap hasil evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi dinilai sebagai rutinitas tahunan belum mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam menunaikan kewajiban dan tugas legislasi.

Kata kunci: evaluasi, inventarisasi, prolegnas.

EDUCATION SYSTEM REFORM IN INDONESIA: PROGRESS AND CHALLENGES

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 149-160

Education system in Indonesia has been reformed several times. Currently, the Law No. 20 Year 2003 on National Education System is the legal basis of the implementation of education system in Indonesia. There are several improvements of education system in Indonesia that almost reached the goal, but the problems and challenges should get more attention from the Government and the Parliament as policy makers. The present article addresses two main questions: What were the main achievements of education reform in Indonesia? and What are the problems and challenges of education system in Indonesia. This paper is the result of library research. First, it explores the existing laws relating to Indonesia's education system as a starting point. Second, it uses available quantitative and qualitative secondary data from national and international sources. Third, it draws on consultation meetings with supervisors. The findings obtained from this study are that the government has expected to create the legal basis for running the 12-year compulsory program so it can be implemented nationally. Thus, although the 9-year compulsory program is almost close to the target, the government can give increased attention to access to education in remote areas so that the target can be met 100%. In terms of curriculum change, it needs to consider the formulation of a period of change between 5 or 10 or 15 years. The government needs to give attention to the teacher to create policies that make them be faithful and love their profession.

Keywords: reform of education system, achievement of Indonesia's education system, and education system policy.

Handrini Ardiyanti (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN,
SEBUAH TELAHAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA**

Kajian Vol. 22, No. 2, Tahun 2017, hlm. 161-177

Kebijakan perfilman yang diterapkan negara mempengaruhi perkembangan industri perfilman di negara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perfilman mempengaruhi perkembangan industri perfilman di suatu negara dapat diketahui antara lain dengan cara melakukan studi sejarah. Karena itu, perlu dilakukan studi sejarah untuk mengetahui sejarah perkembangan perfilman Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman tersebut ditelaah dengan konsep-konsep terkait dengan industri budaya. Dari hasil telaah diharapkan dapat diketahui kebijakan yang dapat mendorong perkembangan industri perfilman Indonesia. Dari hasil telaah diketahui sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan perfilman Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi tahapan produksi dengan memberikan dukungan maksimal bagi tumbuh berkembangnya sekolah film, membantu permodalan dengan sistem fund to funds, memperbaiki kebijakan sensor yang mempertimbangkan proses produksi film, mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya konsep bioskop komunitas, mendukung promosi film Indonesia dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan lainnya dibawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif, dan menumbuhkembangkan kebanggaan pada film Indonesia melalui strategi ekspansi budaya.

Kata kunci: Film, Industri Perfilman, Industri Budaya, Industri Kreatif.